

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis (Renstra) SKPD lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan berisi program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju. Proses penyusunan Renja Kecamatan Sukatani dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan data, kemudian menentukan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi SKPD sesuai dengan RENSTRA SKPD. Adapun prinsip-prinsip dalam penyusunan RENJA adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada RENSTRA SKPD
- b. Rumusan program /kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan pilihan pemerintahan daerah.
- c. Program/kegiatan yang termuat dalam Renja SKPD haruslah disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
- d. Program /kegiatan yang termuat dalam Renja SKPD merupakan hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Anggaran yang dilaksanakan setiap tahun.;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja

Perencanaan dan penyusunan anggaran menjadi dasar untuk menterjemahkan visi, misi yang telah ditetapkan menjadi suatu rencana kerja yang nyata dan terukur. Dalam tatanan operasional, rencana kerja dan anggaran merupakan acuan kerja sekaligus menjadi alat pengendalian dan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pemerintahan Kecamatan Sukatani.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 54);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 54 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2023 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun lalu sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA -PPAS) Tahun 2023;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang Pelayanan masyarakat.
4. Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta beserta peluang dan tantangan yang dihadapi;
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUKATANI

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) perangkat daerah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2022 sebagai berikut :

Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2022 telah mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 4.141.567.225.- dan dana sebesar itu diarahkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.489.474.026,00 .- dan Belanja Langsung sebesar Rp 652.093.199,00.- kemudian dana untuk Belanja Langsung tersebut di distribusikan untuk melaksanakan 5(lima) Program , 10 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dari ke 10 kegiatan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan di atas dapat dilihat pada table 2.1 di bawah ini Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Tabel T-C.29
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 Triwulan III		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2022) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2022) Tahun yang dievaluasi (Triwulan III)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Keterangan / Penjelasan	Perangkat Daerah	Predikat Kinerja
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = (11/9 x 100)	16 = (12/10 x 100)	17 = 7+11	18 = 10+12	19 = (15/5 x 100)	208 = (16/6 x 100)	21	20	21

7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				9.556.106.263		2.550.080.744		4.048.141.505				63,22		2.550.080.744		63,22		Kecamatan Sukatani	
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B		B		B		B		100,00		B		100,00		Realisasi target capaian kinerja sangat tinggi karena di dukung oleh kegiatan/subkegiatan yang menunjang dalam pencapaian	Kecamatan Sukatani	SANGAT TINGGI
																		indikator program		
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	300,00		93,53		100,00		16,16		16,16		109,69		36,56		Realisasi capaian kinerja masih sangat rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indikator, selain itu keterbatasan pagu anggaran turut mempengaruhi realisasi capaian kerjanya	Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2022) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2022) Tahun yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Keterangan / Penjelasan	Perangkat Daerah	Predikat Kinerja
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (11/9 x 100)	14 = (12/10 x 100)	15 = 7+11	16 = 8+12	17 = (15/5 x 100)	18 = (16/6 x 100)	19	20	21
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik		0,00	0	Baik	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00		Realisasi capaian kinerja masih sangat rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indikator, selain itu keterbatasan pagu anggaran turut mempengaruhi realisasi capaian kerjanya	Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	300,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Realisasi capaian kinerja terbilang sedang, meskipun belum tercapai sepenuhnya, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, masih perlu di dorong untuk menunjang pencapaian indikator, termasuk dukungan kebutuhan anggarannya	Kecamatan Sukatani	SEDANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2022) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2022) Tahun yang dievaluasi (Triwulan I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022		Keterangan / Penjelasan	Perangkat Daerah	Predikat Kinerja
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (11/9 x 100)	14 = (12/10 x 100)	15 = 7+11	16 = 8+12	17 = (15/5 x 100)	18 = (16/6 x 100)	19	20	21
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	300,00	52.692.960	0,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	Realisasi capaian kinerja masih sangat rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indikator, selain itu keterbatasan pagu anggaran turut mempengaruhi realisasi capaian kerjanya	Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	300,00	314.087.621	100,00	62.926.290	100,00	36.807.000	0,00	0	0,00	0,00	100,00	62.926.290	33,33	20,03	Realisasi capaian kinerja masih sangat rendah, karena kegiatan/subkegiatan yang mendukung program, belum optimal dalam menunjang pencapaian indikator, selain itu keterbatasan pagu anggaran turut mempengaruhi realisasi capaian kerjanya	Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara fungsi dari Kecamatan disebutkan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Fasilitasi dan Evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan usaha Milik Desa; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukatani Tahun 2022 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Sukatani yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Untuk pencapaiannya kinerja pelayanan Kecamatan Sukatani Tahun 2022 sebesar 93,73%.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada tabel T-C.30 di bawah ini:

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan			100%	92%	100%	94%	95,19	92%	93,73%	94%	
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran			100%	100%	96,33%	100%	87,72%	96,33%	97,39%	100%	Sampai dengan triwulan III
3	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan			51%	100%	100%	100%	51%		93,37%	-	
4	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan			100%	100%	100%	Baik	100	96%	97,39%	49%	
5	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik%	Baik	Baik	
6	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
7	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			-	-	100%	100%	100%	-	-	-	
8	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan			-	-	100%	100%	-	-	-	-	
9	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan											

Dari Tabel T-C.30 menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 untuk Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dari target 100% terealisasi 93,73 %. Dan untuk Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dapat tercapai 97,39 %. Selanjutnya Capaian kinerja baik dari Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan maupun Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran tahun 2022 kecamatan bisa sesuai target.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat mempresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan Sukatani Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan kecamatan Sukatani telah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun harus diakui pelaksanaan program dan kegiatan ada yang terkendala dan dibatalkan pelaksanaan kegiatan utamanya sehingga berakibat capaian kegiatan dan program mengalami perubahan.

Salah satu isu yang sangat penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 yang lalu adalah masih munculnya wabah Covid-19 yang sampai sekarang masih berlanjut. Sebagai akibat adanya wabah Covid-19 yang dianggap sebagai bencana yang tak terduga (Force majeure), di seluruh wilayah Indonesia, maka dilakukan refocusing kegiatan dan belanja yang sudah dianggarkan pada setiap program kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2022.

Program dan kegiatan Pada Kantor Kecamatan Sukatani tahun anggaran 2022 semula 5 (Lima) Program, yaitu

1. PROGRAM PENGANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA;
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN;
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHN DAN PELAYANAN PUBLIK

Adapun permasalahan utama (Strategic Issue) yang dihadapi kantor Kecamatan Sukatani Pada Tahun 2022 antara lain adalah

1. Kurangnya Sumber daya manusia dalam bidang sesuai Tupoksi;
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana OPD yang mempunyai kondisi baik untuk menunjang kegiatan-kegiatan fasilitasi dan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;
3. Kurangnya sumber daya manusia yang mengerti IT;
4. Belum tersedianya sarana yang memadai untuk melakukan penyimpanan arsip;
5. Jumlah Kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
6. Masih lemahnya Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak melaksanakannya hasil koordinasi;

7. Pola Pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
8. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukatani

Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan, maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut maka aparatur Kecamatan Sukatani harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sebagai perencana, pelaksana dan evaluasi secara independen, obyektif dan Proposional berdasarkan standart pelayanan prima untuk mendorong kualitas pelayanan publik meningkatkan kinerja Aparatur. Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

1. Camat

Camat mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;
memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggara Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi ;
 - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 2) pelapora pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
- 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati .
- f. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi;
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertical terkait;
 - 2) efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan
 - 4) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai azas kewajiban, dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak di laksanakan oleh unit

- kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai wilayah Kecamatan;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan
- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
 - n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;
- Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai **fungsi:**

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan

kecamatan;

- a. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai perincian tugas:

- c. menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- h. mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja kecamatan;
- i. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- j. memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
- k. mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
- n. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sekretaris;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

3. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen

Perencanaan dan pelaporan,serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- c. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
- d. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan;
- e. membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan;
- h. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup kecamatan;
- k. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
- l. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- m. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;

- n. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- o. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup kecamatan;
- p. menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
- q. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- s. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- t. mengatur administrasi perjalanan dinas;
- u. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;
- w. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

4. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;

- c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas :

- a. rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup kecamatan;
- c. mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;
- d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
- f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;
- g. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;
- h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;

- i. melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
- k. mengelola administrasi gaji pegawai;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;
- m. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:

- f. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;
- k. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- l. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- m. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- o. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;
- p. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai perincian tugas :

- g. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa,serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

- i. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- j. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- k. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;
- l. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antar golongan;
- m. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;
- n. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- o. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- q. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan

melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
- e. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- f. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk

ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau kelurahan;

- c. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat

- pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
- g. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga;
- c. berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;

- d. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
- e. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;
- g. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
- h. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
- j. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;
- e. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat;

2.4. Review Terhadap rancangan Awal SKPD

Penyusunan Renja Kecamatan Sukatani kabupaten Purwakarta tahun 2023 sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, yang telah dituangkan secara rinci dan jelas dalam Renstra Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta . Bilamana dalam proses perkembangannya terjadi perubahan dalam RKPD baik berupa prioritas, isu strategis maupun kemampuan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan Renja Kecamatan Sukatani Tahun 2023 maka berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 menjadi pedoman utama Kecamatan Sukatani dalam mereview terhadap rancangan awal SKPD sebagaimana dalam Tabel T-C.31 berikut :

Tabel TC-31

**REVIEW RANCANGAN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

Unit Organisasi : 7.01.01.2.01 Kecamatan Sukatani

Sub Unit Organisasi : 7.01.01.2.01 Kecamatan Sukatani

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program Kegiatan	Periode Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian program		Keluaran Sub kegiatan		Hasil kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					Unsur Kewilayahan												
7	1				Kecamatan						4.051.535.575	4.445.689.132					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.434.455.660	3.595.678.443					
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000	11.000.000					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Dokumen perangkat Daerah	1 Dokumen			1.980.000	2.178.000	
7	1	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen			1.980.000	2.178.000	

7	1	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen			2.040.000	2.244.000	
7	1	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Dokumen			1.960.000	2.156.000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Dokumen			2.040.000	2.244.000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3.245.810.071	3.570.391.078	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	14 Bulan			3.239.474.271	3.563.421.698	

7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen			16.435.800	7.079.380	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											206.707.500	227.378.250	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 item			17.994.800	19.794.280	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	25 Paket dan 5 item			16.711.500	18.382.650	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah penyediaan logistik kantor	24 item , 660 dus dan 3 paket			122.381.300	134.619.430	

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	5 item			14.999.900	16.499.890	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	384 OH			34.620.000	38.082.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									88.509.700	97.360.670		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	16 item			38.575.800	42.433.380	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4 unit			49.933.900	54.927.290	

7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									268.054.704	294.860.174			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2 item			10.000.000	11.000.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12 bulan			33.204.600	36.525.060	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	13 bulan			224.850.104	262.500.000	
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									101.191.000	111.310.100			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan perorangan Dinas ataukendaraan Dinas jabatan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2 unit dan 7 unit			31.000.000	34.100.000	

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	13 unit			9.340.000	10.274.000	
7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 unit			48.200.000	53.020.000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 unit			12.651.000	13.916.100	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										49.127.000	54.039.700	
7	01	02	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										49.127.000	54.039.700	
7	01	02	02.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Capaian hasil survey kepuasan masyarakat	10 Dokumen			49.127.000	54.039.700	

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										52.600.000	57.860.000	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										52.600.000	13.487.343	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelestarian dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				52.600.000	57.860.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										19.435.600	21.379.160	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa										19.435.600	21.379.160	
7	01	06	2,01	05	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	100 Persen	Persentasi Pembinaan Kepala Desa dan Apartur Desa	1 Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan andesa	100 %	14.440.000	15.884.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

7	01	06	2,01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				4.995.600	5.495.160	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
Jumlah Total													4.051.535.575	4.445.689.132		

4.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Sukatani merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang tingkat desa diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat desa yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Desa;
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di Desa setempat;
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah;
- Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD, APBD provinsi atau oleh Pusat;
- Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di Desanya di forum musrenbang kecamatan.

Hasil Musrenbang RKP-Desa dari 14 (dua belas) desa di wilayah Kecamatan Sukatani tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten. Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Sukatani Tahun 2023 seperti nampak pada tabel T-C.32 berikut ini :

Tabel T-C.32

DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2023 KECAMATAN SUKATANI

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023	BIDANG URUSAN	USULAN PERMASALAHAN	URAIAN PERMASALAHAN	KOEFISIEN / VOLUME	ALAMAT LOKASI / DESA		PAGU	PERANGKAT DAERAH YANG DITUJU
1	Peningkatan Infrastruktur Dasar Prekonomian Masyarakat	PUPR	Perbaikan jalan dan jembatan Kabupaten	Belum ada jembatan perhubungan antar RT		Sukatani	Kp.Garukgak Rt.015/005 Desa Sukatani		Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
2	Peningkatan Infrastruktur Dasar Prekonomian Masyarakat	PUPR	Pembangunan rehabilitas dan peningkatan jaringan irigasi	Lahan persawahan sering mengalami kekeringan		Tajursindang	RT.001/01		Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar Prekonomian Masyarakat	PUPR	Perbaikan jalan dan Jembatan Kabupaten	Jembatan penghubung antar Desa Pasirmunjul dengan Sukajadi sudah tidak layak		Pasirmunjul	Kp.Randiah		Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang

4	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja (menjahit)	Banyaknya pengangguran lulusan sekolah		Cijantung	Cijantung		Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
5	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perumahan & Kasawan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan	Kondisi jalan yang tidak layak		Panyindangan	Kp.Ciparang Rt.001/001		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana	LH	Penyediaan sarana persampahan	Belum tersedianya sarana untuk sampah		Cilalawi	Rt.001 Dusun 1		Dinas Lingkungan Hidup
7	Peningkatan Infrastruktur Dasar Prekonomian Masyarakat	PUPR	Perbaikan jalan dan jembatan Kabupaten	Belum ada jembatan penghubung antar RT		Cipicung	Cipicung		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perumahan & Kasawan Permukiman	Perbaikan jalan lingkungan	Kondisi jalan yang sudah tidak layak		Cianting	Kp.Cibentar Rt.020/005		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

9	Pembangunan Rumah tidak layak huni	Perumahan & Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah tidak layak huni	Masih banyak rumah yang tidak layak		Malangnengah	Dusun 1 & 2		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Peningkatan Infrastruktur Dasar Prekonomian Masyarakat	PUPR	Pembangunan Rehabilitas & Peningkatan jaringan irigasi	Lahan pesawahan sering mengalami kekeringan		Sukamaju	Dusun 1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Peningkatan Perekonomian	Ekonomi	Pengembangan UMKM	Pemulihan Ekonomi dan Pelindungan ekonomi social masyarakat masih perlu ditngkatkan		Cianting Utara	Kp.Cilalawi		DKUPP
12	Peningkatan Kesehatan	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Penangan Stunting		Desa Sindanglaya	Desa Sindanglaya		Dinas Kesehatan
13	Peningkatan Fasilitas Olah Raga	Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata & Kebudayaan	Pembangunan dan Pembinaan Keolahragaan	Kurangnya sarana & prasarana olah raga		Sukajaya	Kp.Citapen RW.004		Dinas Kepemudaan Olah Raga Pariwisata & kebudayaan

14	Peningkatan Budidaya ternak	Peternakan	Penyediaan Bibit Ternak	Peningkatan perekonomian masyarakat		Cibodas	Cibodas		Dinas Perikanan dan Peternakan
15	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perumahan & Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Lingkungan	Kondisi jalan yang sudah tidak layak		Cibodas	Cibodas		DISTARKIM
16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelayanan Kesehatan	Kegiatan Posyandu masih menumpang		Cibodas	Cibodas		DPMD
17	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja (Menjahit)	Banyak Pengangguran lulusan sekolah		Sukajaya	Sukajaya		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18	Peningkatan Budidaya Ternak	Peternakan	Penyediaan Bibit Ternak	Banyaknya angka pengangguran setelah pandemi		Sukajaya	Kp.Citepen		Dinas Perikanan dan Peternakan

19	Penyediaan Kelengkapan jalan Kabupaten	PUPR	Perbaikan jalan Kabupaten	Kondisi jalan yang rusak		Desa Sindanglaya	Desa Sindanglaya		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Peningkatan Fasilitas Olah Raga	Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata & Kebudayaan	Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan	Kurangnya sarana dan prasaran olah raga		Cianting Utara	Cianting Utara		Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata & Kebudayaan
21	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja (Untuk Petani)	Para Petani belum mengenal teknologi tepat guna		Sukamaju	Dusun 1 & 2		Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
22	Pembangunan Jalan Lingkungan	Perumahan & Kawasan Permukiman	Perbaikan jalan lingkungan	Kondisi jalan yang tidak layak		Malangnengah	Kp.Malangnengah Dusun 1 dan 2		DISTARKIM
23	Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase	Perumahan & Kawasan Permukiman	Perbaikan jalan lingkungan & Drainase	Kondisi jalan & drainase rusak		Cianting	Kp.Adat Rt.023/008		DISTARKIM
24	Peningkatan Penerangan Jalan	Perhubungan	Penyediaan Kelengkapan jalan	Kurangnya penerangan jalan Kabupaten		Cipicung	Desa Cipicung		DISHUB

25	Pembangunan jalan lingkungan	Perumahan & Kawasan Permukiman	Perbaiki jalan lingkungan	Kondisi jalan yang sudah tidak layak		Cilalawi	Kp.Jambu sewu Cilayung Dusun 1 & 2		DISTARKIM
26	Peningkatan Infrastuktur dasar perekonomian masyarakat	PUPR	Pembangunan jalan strategis desa	Kondisi jalan yang sudah tidak layak		Panyindangan	Kp.Bihbul RT.017/001		Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
27	Pembangunan rumah tidak layak huni	Perumahan & Kawasan Permukiman	Perbaiki rumah tidak layak huni	Masih banyak rumah tidak layak huni		Cijantung	Cijantung		Perumahan & Kawasan Permukiman
28	Peningkatan Infrasktur dasar perekonomian masyarakat	PUPR	Pembangunan rehabilitas & peningkatan jaringan irigasi	Lahan persawahan sering mengalami kekeringan		Pasirmunjul	Dusun 1		Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang
29	Peningkatan Infrasktur dasar perekonomian masyarakat	PUPR	Perbaiki jalan dan jembatan Kabupaten	Jembatan penghubung antar Desa belum layak		Tajursindang	Kp.Garunggan Rt.021/006		Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang

30	Pembangunan rumah tidal layak huni	Perumahan & Kawasan Permukiman	Perbaikan rumah tidal layak huni	Masih banyak rumah yang tidal layak huni		Sukatani	Dusun 1 dan 2		Perumahan & Kawasan Permukiman
31	Peningkatan Budidaya Ternak	Perternakan	Penyediaan bibit ternak	Meningkatannya perekonomian masyarakat		Sukatani	Sukatani		Dinas Perikanan dan Peternakan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

4.4 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023, adalah :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Pemajuan Kebudayaan;
2. Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi;
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern;
4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah;
5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dan Pengelolaan.

Dan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten Purwakarta tersebut yang menjadi prioritas Kecamatan Sukatani Tahun 2023, yang terkait pada pembangunan adalah ***Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern*** .

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja

a. Tujuan

Tujuan dengan Disusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani Tahun 2023 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2023 dan untuk mewujudkan sinergitas dari usulan fasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Purwakarta yaitu “ ***Purwakarta Istimewa*** “ dengan Misi : **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional** dengan Tema pembangunan ” **PEMBANGUNAN PARIPURNA MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA.**

b. Sasaran Renja

Penyusunan Renja Kecamatan Sukatani mempunyai sasaran kepada kebutuhan Pelayan prima kepada masyarakat dengan memberikan fasilitasi yang memadai di Kecamatan Sukatani dan meningkatkan kualitas aparatur, dalam rangka mengakomodasikan

pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta meningkatkan kesinambungan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diarahkan didalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Sukatani tahun 2018-2023. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan renja Kecamatan Sukatani meliputi:

1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE;
3. Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
4. Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;

3.3 Program dan kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Kecamatan Sukatani untuk tahun 2023 mempunyai 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan serta 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel-TC.31

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000Kecamatan Sukatani
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sukatani

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program Kegiatan	Periode Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian program		Keluaran Sub kegiatan		Hasil kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7					Unsur Kewilayahan											
7	1				Kecamatan						4.051.535.575	0				
7	01	01			PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Rp3.434.455.660					
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Dokumen perangkat Daerah	1 Dokumen			1.980.000	
7	1	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen			1.980.000	

7	1	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Dokumen			2.040.000		
7	1	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Dokumen			1.960.000		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Dokumen			2.040.000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3.255.810.071		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	14 Bulan			3.239.474.271		
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Dokumen			16.335.800		

7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										206.707.500			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 item			17.994.000		
7	01	01	2.06	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	384 OH			38.082.000		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	25 Paket dan 5 Item			16.711.500		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah penyediaan logistik kantor	24 item,660 Dus dan 3 paket			122.381.300		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	5 item			14.999.900		

7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										80.509.700			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	16 item			38.575.800		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4 unit			49.933.900		
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										268.054.704			
7	01	01	2.04	04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12 bulan			31.000.000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2 item			10.000.00		

7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	13 bulan		224.850.104		
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									101.191.000		
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2 unit Pajak dan 7 unit		31.000.000		
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	13 unit		9.340.000		
7	01	01	2..09	9	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 unit		48.200.000		
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 unit		12.651.000		

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								49.127.000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								49.127.000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		49.127.000		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								19.435.600		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa								19.435.600		
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		14.440.000		
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		4.995.600		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								52.600.000		
7	0	05	2..01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								52.600.000		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.Pelestarian dan	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Kab.Purwakarta Kec.Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat daerah, Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan perkantoran	100%	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		52.600.000		

					pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
					Jumlah Total										4.051.535.575		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUKATANI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2023 dan sekaligus merupakan referensi bagi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yang berisikan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rancangan awal Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sukatani tahun 2023 ini berisikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya serta kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2023 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta baik sekretariat maupun Seksi – Seksi, demi mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari

keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukatani kabupaten Purwakarta tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 tentang Rancangan Awal Program, kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

TABEL 4.1
RANCANGAN AWAL PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN								4.051.535.575	4.445.689.132			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.434.455.660	3.595.678.443			
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.000.000	11.000.000			
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini; Persen	Jumlah dokumen	1 dokumen	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Program dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sukatani	100 %	1.980.000	2.178.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Laporan	1 dokumen	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Program dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sukatani	100 %	1.980.000	2.178.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Laporan	1 dokumen	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Program dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sukatani	100%	2.040.000	2.244.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	CapaianSAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini ; Persen	Jumlah Dokumen Laporan	1 dokumen	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Program dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sukatani	100%	1.960.000	2.156.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.01.017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	CapaianSAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini ; Persen	Jumlah Dokumen Laporan	1 dokumen	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Program dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sukatani	100 %	2.040.000	2.244.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3.255.810.071	3.570.391.078	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	CapaianSAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini ; Persen	Jumlah Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	14 bulan	Meningkatnya Kualitas administrasi Keuangan Kec. Sukatani	100 %	3.239.474.271	3.563.421.698	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang	Kab. Purwakarta Sukatani	CapaianSAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini ; Persen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	1 bulaDokumen	Meningkatnya Kualitas administrasi Keuangan Kec. Sukatani	100 %	16.435.8000	7.079.380	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
						Baik dan Efektif										Pelayanan Dasar	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							206.707.500	227.378.250				
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya a Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	CapaianSAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini ; Persen	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	15 Item	Meningkatnya Pemerintah Daerah Kualitas administrasi Penyelenggaraan	100 %	17.994.800	19.794.280	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	016	2,0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya a Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	CapaianSAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini ; Persen	Jumlah Pengadaan peralatan Rumah Tangga	25 paket dan 5 item	Meningkatnya Pemerintah Daerah Kualitas administrasi Penyelenggaraan	100 %	16.711.500	16.711.500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangun an Nasional	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini; Persen	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah mamin yang disediakan	24 item 660 dus 3 paket	Meningkatnya Pemerintah Daerah Kualitas administrasi Penyelenggaraan	100 %	122.381.300	134.618.430	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini; Persen	Jumlah Cetak dan Penggandaan	5 item	Meningkatnya Pemerintah Daerah Kualitas administrasi Penyelenggaraan	100 %	14.999.900	16.499.890	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini; Persen	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	99 OH	Meningkatnya Pemerintah Daerah Kualitas administrasi Penyelenggaraan	100 %	34.620.000	38.082.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														88.509.700	97.360.670	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini; Persen	Jumlah Pengadaan Mebel	16 item	Meningkatnya Pemerintah Daerah Kualitas administrasi Penyelenggaraan	100%	38.575.800	42.433.380	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini; Perse n	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	4 unit	Meningkatnya Pemerintah Daerah Kualitas administrasi Penyelenggaraan	100%	49.927.290	54.927.290	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										268.054.704	294.860.175	
7	01	01	2,04	04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK		Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini	Jumlah rekening Langgan dalam Penyediaan Jasa	2 Rekening	Meningkatnya Kinerja Administrasi	100 %	33.204.600	36.525.060	Meningkatkan Sumber Daya

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif(Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif				Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya a Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini; Persen	Jumlah rekening Langganan dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	3 Rekening	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya a Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini; Persen	Jumlah Penyediaan Pegawai Non ASNsa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	9 Orang	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	224.850.104	247.335.114	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.556.092	105.583.896			
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya a Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini; Persen	Jumlah Kendaraan dinas roda 2 Jumlah Kend Dinas Roda 4	7 Unit 2 unit	Meningkatnya Kualitas Mutu aset Daerah	100 %	31.000.000	34.100.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya a Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan	B; 100 Opini; Persen	Jumlah Komputer	13 unit	Meningkatnya Kualitas Mutu aset Daerah	100 %	9.340.000	10.274.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		Penunjang Pelayanan Perkantoran								Dan Berdaya Saing	
7	1 1 2.09 9	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini ; Persen	Jumlah bangunan/gedung kantor	1 unit	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	48.200.000	53.020.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01 01 2.09 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prsarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B; 100 Opini ; Persen	Jumlah Sarana dan Prasaran bangunan/gedung kantor	1 unit	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	12.651.000	13.916.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										49.127.000	54.039.700	
701	02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										49.127.000	54.039.700	
701	03 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	100 Persen	Persentase penyampaian Informasi hasil Pembangunan pada masyarakat	10 Dokumen	Kualitas hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan pada masyarakat desa	100 %	49.127.000	54.039.700	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										52.000.000	57.860.000	
701	05 2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										52.000.000	57.860.000	

701	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelestarian dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100 Persen	Persentase Kegiatan pembinaan pada anggota Linmas	1 Kegiatan	meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada aparatur desa	100 %	52.000.000	57.860.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			
701	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										19.425.600	21.379.160				
701	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa															
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	100 Persen	Persentase Pembinaan Kepala Desa dan Apartur Desa	1 Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa	100 %	14.440.000	15.884.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			
				Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Kab. Purwakarta Sukatani	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	100 Persen	Persentase Pengawasan dan Koordinasi Kewilayahan	1 Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa	100 %	4.995.000	5.495.160	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			
				Jumlah Total										4.051.535.575	4.445.689.132				

BAB V

PENUTUP

Rencana Awal Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2023, telah disusun berdasarkan acuan dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen anggaran yang ada, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dengan adanya Dokumen Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Sukatani ini diharapkan penerapan dan pelaksanaan Program serta kegiatan yang diemban oleh Kecamatan Sukatani betu-betul dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan masyarakat Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani ini disusun, dengan harapan semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan pengarah pelaksanaan semua program dan kegiatan di tahun 2023 mendatang, terakhir kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan, untuk diharapkan dari semua unsur yang terlibat (*stakeholders*) dapat member masukan demi penyempurnaan dokumen ini, terimakasih.

Pasawahan, 24 Agustus 2022

CAMAT SUKATANI

HASANUDIN.S.Pd
Nip.19660304 199103 1009